

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002)

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta: Gitama Jaya, 2008)

Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011)

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis, (Jakarta: 2025)

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, (Jakarta: Inda Hill-Co, 2009)

Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)

Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, (Surabaya: Refika Aditama, 2007)

Habib Adjie, Penerapan pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)

- Herlien Budiono, Demikian Akta Ini (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit, (Jakarta: Rajawali Press, 2022)
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Raimon Hartadi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Ridiana Larasati, Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023)
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, Jaminan Hak Tanggungan, (Bandung: PT Refinka Aditama, 2021)
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013)
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005)

Suratmah dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Jurnal

Ahmad Syarif Hidayatulloh, et al, Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.1, No.4 Juni 2024. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1652>.

Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0, Notarius, Vol. 15, No.1 April 2022. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.

Denico Doly, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah, Negara Hukum, Vol.2, No.2, November 2017. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.217>.

Dewi Setyowati dan Miftakhul Huda, Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, UNES Law Review, Vol.6, No.3, Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Notaris Pada Proses Peningkatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor 53/PID.B/2017/PN.BKT), Soumatra Law Review, Vol.2, No.1, April 2019. DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3557.g1338>.

- Ghansam Anand, et al, Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Vol. 15, No.2, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. DOI: [10.22212/jnh.v15i2.4399](https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399).
- Irma Aisyah, et al, Kedudukan Notaris Dalam Penyimpanan Sertipikat Pada Masa Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kota Padang, UNES Law Review, Vol.6, No.1 Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- I Made Dwiki Indra Suksma Budiarsa dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan Penyimpanan Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Notaris, Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No.9, Juni 2021.
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No.1 Juli 2021. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Jeane Neltje Saly, et al, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No.20 Oktober 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416104>.
- Jeffri Qomaruddin dan Rusdianto Sesung, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sertifikat Hak atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.8, No.1 Juli 2024. DOI: <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v8i1.2828>.
- Jocelyn Cherieshta, et al, Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.8, No.1 Mei, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

- Justin Parningotan Malau dan Rusdiyanto Sesung, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah Setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibatalkan Pengadilan, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 33, No.8 Juli 2018. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i2.173>.
- Maray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol.5, No.3 Maret 2006
- Maygi Agga Siswanto dan Sri Astutik, Tanggung Jawab Notaris atas Penyerahan Sertipikat Tanah Tanpa Kata Sepakat, Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 1, No.3 Juni 2021. DOI: <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.339>.
- Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9, No.2 November 2020. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.
- Tri Ulfi Handayani, et al, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik di Kabupaten Pati, Jurnal Akta, Vol. 5, No.1 Januari 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.
- Vini Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, Lex Renaissance, Vol. 2, No.1 Januari 2017. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>.

Hasil Penelitian

- Alvin Nathanael Widjaja, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terkait Adanya Pengikatan Jual Beli”, Thesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024

Sukma Raka Pratama Karyana Mukti, “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”. Thesis, Semarang: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kode Etik Notaris

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN Byl

Website/Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanggung Jawab”, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 27 Januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Metode”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>, diakses 28 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penelitian”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penelitian>, diakses 28 Februari 2025

Renata Christha Auli, “Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886/>, diakses 1 Mei 2025

Wawancara

Hasil wawancara dengan Helly Sitepu, Notaris dan PPAT Kota Medan, Jakarta, Tanggal 11 Januari 2025, Pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, Notaris dan PPAT Kota Depok dan pengajar Teknik Pembuatan Akta, Jakarta, Tanggal 1 Maret 2025, Pukul 19.30 WIB